

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arab Saudi terletak di antara 15°LU - 32°LU dan antara 34°BT - 57°BT. Luas kawasannya adalah 2.240.000 km². Arab Saudi merangkumi empat perlima kawasan di Semenanjung Arab dan merupakan negara terbesar di Asia Timur Tengah. Permukaan terendah di sini ialah di Teluk Persia pada 0 m dan Jabal Sauda' pada 3.133 m. Arab Saudi terkenal sebagai sebuah negara yang datar dan mempunyai banyak kawasan gurun. Gurun yang terkenal ialah di sebelah selatan Arab Saudi yang dijuluki "Daerah Kosong" (dalam bahasa Arab, Rub al Khali), kawasan gurun terluas di dunia.

Namun di bagian barat dayanya, terdapat kawasan pegunungan yang berumput dan hijau. Hampir tidak ada sungai atau danau permanen di negeri ini, tetapi terdapat banyak wadi. Beberapa daerah subur dapat ditemukan dalam endapan aluvial di wadi, basin dan oasis. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan atau monarki konstitusional, tergambar dalam namanya "Kerajaan Arab Saudi". (Haif 2015)

Kerajaan Arab Saudi berdiri sejak 1932 dan berada di bawah pimpinan keluarga Al-Saud. Secara historis salah satu negara teluk Tni menjadi tempat lahirnya agama Islam serta sebagai sumber ladang minyak melimpah dengan rata-rata produksi 10 juta barrel per hari. Sebagai negara yang memiliki sejarah penting dalam Dunia Islam dan sumber daya minyak terbesar di dunia

menyebabkan Arab Saudi memiliki peran dan pengaruh besar di dunia. (Taufiq 2017)

Terbatasnya hak-hak politik ini setidaknya berjalan sampai beberapa dekade sampai pada 2005 ketika tampuk kekuasaan dipegang oleh Raja Abdullah. Di masa ini, kebijakan baru dikeluarkan untuk mereformasi sistem yang lebih terbuka dan memberikan partisipasi yang lebih besar kepada rakyat. Pemilihan umum mulai diterapkan, di mana rekrutmen politik yang sebelumnya bersifat eksklusif mulai ditinggalkan. Hal yang paling signifikan adalah penerapan hak perempuan untuk memilih dan dipilih dalam beberapa pemilu lokal. (Anwar 2016)

Arab Saudi telah menjadi negara utama dalam dunia Islam, bukan hanya karena sebagai tempat lahirnya agama Islam tetapi juga keberadaan dua kota suci umat Islam yaitu Makkah dan Madinah menjadikan Arab Saudi sebagai *hearth of Islam*. Karakteristik politik luar negeri Arab Saudi memiliki idealisme akan kesatuan Islam (*muslim solidarity and unity*), selain itu Arab Saudi merupakan negara simbol atas kepemimpinan Sunni di timur-tengah. Dalam beberapa kasus, Arab Saudi menempatkan pilihan politiknya untuk mendukung Sunni dan membatasi Syiah. Dalam arah politik luar negeri akan *muslim solidarity and unity*, Arab Saudi dalam penerapannya dimana proaktif dalam mendukung pemerintahan Sunni dan lebih anti terhadap Syiah.

Arab Saudi yang merupakan negara monarki konservatif yang berlandaskan Islam, kesatuan umat Islam adalah tujuan utama Arab Saudi. Akan tetapi bagi Arab Saudi, *Ahlussunnah wal Jama'ah* atau Sunni sebagai ideologi Islam yang

benar, dan Syiah sebagai golongan yang ditentang. Hal ini tidak terlepas dari perbedaan dasar-dasar ajaran dari kedua golongan ini, dan konstitusi Islam yang dianut Arab Saudi pada dasarnya adalah ajaran dasar yang dipakai golongan Sunni. Dampak lain dari posisi Islam didalam politik luar negeri Arab Saudi adalah sikap Arab Saudi yang anti-komunis karena anggapan bahwa komunis adalah paham yang anti agama dan ateistik. (Ikhsan 2015)

Sebagai pusat Islam dan negara Sunni terbesar di kawasan, Saudi merasa perlu ‘bertanggung-jawab’ dalam setiap konflik regional. Konflik di Yaman, misalnya, memperlihatkan tindakan Saudi membantu pemerintah melawan pemberontak Syiah Houti (Dorsey, 2015). Perang saudara yang sangat kuat diwarnai isu sektarian ini menjadi bukti nyata intervensi Saudi untuk mengembalikan kekuasaan Sunni di Yaman. (Ikhsan 2015)

Berawal dari peristiwa Arab Spring dimana Arab Spring menunjukkan banyak kaum Muslim, demokrasi adalah jalan yang pantas untuk menciptakan bentuk negara ideal. Revolusi tahun 2011 tidaklah sama dengan revolusi yang terjadi di Iran tahun 1979 yang menjadikan agama sebagai dasar dan tujuan revolusi. Berbeda dengan Ayatollah Komeini di Iran, Mesir dan Tunisia bukanlah tempat untuk menghadirkan Islam sebagai justifikasi tindakan-tindakan tertentu. Agama menjadi hal yang plural dan terbuka atas demokrasi. (Yasmine 2015)

Gejolak Arab Spring yang melanda negara-negara Arab menambah catatan sejarah peristiwa konflik yang melanda Timur Tengah. Istilah Arab Spring (alrabii’ al-arabiy) dan atau Revolusi Arab (al-thauraat al-arabiyah) adalah dua frase yang mengandung makna berbeda. Arab Spring merupakan suatu proses

intelektual atas dorongan yang dibangun dari kesadaran, ide, gagasan dan keinginan rakyat atas pentingnya demokratisasi yang tidak terbendung diawali dari media sosial. Sedangkan Revolusi Arab adalah adanya keinginan perubahan dari rakyat bersifat fundamental yang mencakup berbagai bidang dan bersifat kompleks, karena bukan hanya kebebasan berpendapat namun semua aspek kehidupan cukup vital. Seperti tuntutan aktivis Mesir yaitu kesetaraan politik (demokrasi), kesejahteraan, dan membangun martabat (Mustahyun 2017) Saudi dan Iran telah terlibat dalam bentrok kepentingan di berbagai negara konflik. Bentrokan tersebut terjadi dalam berbagai pola dan intensitas yang berbeda. (Fanani n.d.)

Pada Maret 2015, otoritas Saudi memulai serangan udara di Yaman untuk memerangi pemberontak Houthi, yang merupakan sekutu Iran, yang berniat mengambil alih pemerintahan. Saat itu, Saudi menuding Iran sengaja memanfaatkan Houthi untuk mengkuadeta pemerintah Yaman yang kala itu dipimpin Presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi. Lagi-lagi, Iran pun menuding serangan udara Saudi menargetkan banyak warga sipil di Yaman. (Taufiq 2017)

Pada tahun 2017, Arab Saudi yang dibantu beberapa negara Arab sekutunya di Teluk Persia mulai mengerahkan lebih dari 200 jet tempur canggih F-16 buatan Amerika Serikat (AS) miliknya untuk membombardir Yaman dalam sebuah operasi militer besar bersandi “Ashifah al-Hazm” (Badai Mematikan/Menentukan). Maka terpanjanglah panorama perang tak seimbang, negara paling kaya dan kuat dari segi perlengkapan militer melawan negara yang tergolong paling miskin dunia sehingga praktis peralatan tempurnya pun apa adanya. Hanya saja, Yaman sebagai sebuah bangsa tergolong paling kaya

peradaban dan martabat sehingga wajar apabila terlihat pantang menyerah sampai sekarang.

Pada kenyataannya, “Badai Mematikan” yang maksudnya adalah serangan yang akan sangat determinan bagi jalannya Perang Yaman sesuai keinginan rezim Riyadh ternyata lebih menyerupai angin sepoi-sepoi, karena tak ada satupun targetnya tercapai.

Sandi operasi kemudian diubah menjadi “I’adah al-Amal” (Pemulihan Harapan). Tapi sandi inipun tak lebih dari sekedar nama, karena kemenangan nan gemilang yang diharapkan Saudi tak jua tercapai, sementara alat penebar maut yang digunakan juga sama. Apa yang dilakukan oleh jubir militer pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi Mayjen Ahmad Asiri hanyalah mendistorsi banyak fakta demi fakta sebagai bentuk perang urat saraf, seperti biasa terjadi pada semua atau banyak peristiwa perang.

Di awal operasi Badai Mematikan, gelanggang politik, militer dan media diriuhan oleh gempita propaganda dan slogan kemenangan Saudi dan sekutunya. Semua media cetak dan elektronik Arab saat itu bahkan memperlihatkan bagaimana Saudi Cs mengumbar intimidasi dan ancaman bahkan terhadap Iran yang mereka anggap beking “milisi” Ansarullah (Houthi). (LiputanIslam.com 2017) PBB memasukkan Saudi dan koalisinya dalam daftar hitam atas pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil, yang menargetkan wanita dan anak-anak. Mestinya peringatan PBB itu menghasilkan sanksi atau larangan negara-negara lain menjual senjata atau memberikan bantuan militer kepada

Saudi. Sebaliknya, di tahun yang sama AS malah menyepakati penjualan baru persenjataan senilai US\$ 110 miliar kepada Saudi. (koransulindo.com 2018)

Pada tahun 2018, pemerintah Arab Saudi masih tetap memberlakukan invasi militernya terhadap Yaman. Puluhan ribu nyawa warga Yaman telah melayang, dan saat ini, jutaan warga Yaman menderita kelaparan akut. Tak berhenti di situ saja, agresi militer terhadap Yaman itu juga telah melahirkan banyak persoalan baru, seperti munculnya wabah kolera yang disebut-sebut sebagai wabah terburuk sepanjang sejarah.

Berbagai bantuan jangka pendek, seperti makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya nyatanya tidak mampu mencukupi kebutuhan warga Yaman. Sebab, berbagai fasilitas yang ada serta mata pencaharian warga Yaman juga telah hancur oleh rudal-rudal militer Arab Saudi. Singkatnya, krisis kemanusiaan yang saat ini melanda Yaman sudah sampai pada level yang sangat mengkhawatirkan. Satu-satunya jalan untuk memulihkan keadaan tersebut adalah dengan menghentikan agresi militer ke Yaman. Sebab Arab Saudi, berdasarkan atas hukum internasional, tidak berhak ikut campur terhadap konflik internal di Yaman, apalagi melakukan agresi militer ke negara itu.

Pasal 51 piagam PBB menyebutkan bahwa sebuah negara tidak boleh memerangi negara lain tanpa mendapatkan izin dari Dewan Keamanan PBB. Arab Saudi telah melanggar pasal tersebut, karena telah memerangi salah satu negara anggota PBB (Yaman) tanpa izin dari DK PBB. Atas dasar itu, agresi militer Arab Saudi ke Yaman adalah tindakan illegal. Berbagai organisasi HAM dunia telah mengecam keras agresi militer itu dan menuntut agar tindakan bar-bar tersebut

segera dihentikan. (LiputanIslam.com 2018) Invasi militer Saudi dan sekutunya ke Yaman hingga sekarang telah merenggut nyawa belasan ribu warga negara ini dan melukai puluhan ribu lainnya. (Pars Today 2018)

Perpecahan internal Yaman telah membusuk selama bertahun-tahun. Yaman Utara dan Selatan bersatu menjadi satu negara pada tahun 1990, tetapi separatis di selatan mencoba untuk melepaskan diri dari utara pro-serikat pada tahun 1994. Pasukan mereka dengan cepat dipukul mundur, dan lebih banyak kekuatan dan sumber daya mengalir ke ibu kota utara Sanaa, membuat marah banyak orang selatan. Mantan Presiden Ali Abdullah Saleh telah memerintah Yaman utara sejak tahun 1978 dan negara tersebut yang bersatu setelah tahun 1990. Tetapi ia mengasingkan banyak orang Yaman. Kerabatnya mengendalikan bagian inti dari tentara dan ekonomi, dan kritikus mengatakan korupsi merajalela.

Di ujung utara, beberapa sekte Zaydi dari Islam Syiah juga bermasalah. Zaydi telah memerintah Yaman utara hingga revolusi tahun 1962, tetapi pusat pemerintahan mereka sekarang miskin. Pada akhir tahun 1990-an, beberapa orang Zaydi membentuk kelompok Houthi, yang memerangi tentara Yaman dan bersahabat dengan Iran.

Meskipun bersekutu dengan Saleh, namun Ikhwanul Muslimin dan Islam Sunni lainnya juga memperoleh kekuatan, terutama di bawah Jenderal Ali Mohsen al-Ahmar, yang membangun basis kekuatan di tentara. Mengambil keuntungan dari persaingan faksi, buronan militan membentuk Al-Qaeda di Jazirah Arab (AQAP) salah satu kelompok sayap paling kuat dan mulai melakukan serangan.

Ketika protes massal meletus pada tahun 2011, beberapa mantan sekutu Saleh membelanya. Pasukan dibagi antara unit yang setia kepada Saleh dan mereka yang mengikuti Ahmar. Separatis berunjuk rasa di selatan. Houthi menguasai lebih banyak wilayah. Serangan AQAP meningkat.

Setelah satu tahun krisis termasuk pengeboman yang hampir membunuh Saleh tetangga Teluk Yaman membujuknya untuk mengundurkan diri, tetapi ia tetap tinggal di Yaman. Wakil Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi terpilih pada tahun 2012 untuk masa jabatan dua tahun untuk mengawasi transisi demokrasi. Pertemuan “Dialog Nasional” semua kelompok oposisi Yaman mulai mengesampingkan konstitusi baru. Tetapi meskipun dilakukan dialog, semuanya berantakan.

Hadi secara luas dipandang lemah dan pemerintahannya korup. Aliansi Saleh di tentara dan pemerintah merusak transisi. AQAP membentuk negara mini dan menyerang Sanaa dengan pengeboman yang berdarah-darah. Pada tahun 2014, Houthi merebut Sanaa dengan bantuan dari unit tentara yang setia kepada Saleh, memaksa Hadi untuk berbagi kekuasaan. Ketika Dialog Nasional mengusulkan konstitusi federal, baik Houthi maupun separatis selatan menolaknya karena menumpulkan aliansi baru mereka. Kelompok Houthi menangkap Hadi pada awal tahun 2015, tetapi dia kabur dan melarikan diri ke Aden. Kelompok Houthi mengejanya, memerangi para loyalis pemerintah transisional.

Beberapa hari kemudian, Arab Saudi memasuki perang Yaman di pihak Hadi, yang didukung oleh koalisi sekutu Arab, untuk mencegah Iran mendapatkan

pengaruh melalui Houthi di perbatasannya, dan untuk mempertahankan transisi yang diperantarai Teluk. Mereka membawa Hadi dari Aden dan membawanya ke Riyadh, secara tidak sengaja menjaga pemerintahannya yang diakui secara internasional dan rencana transisi demokratik.

Krisis itu sekarang merupakan perang antara dua koalisi yang tidak stabil. Kelompok Houthi dan Saleh adalah dua musuh lama yang bersama-sama memerintah dataran tinggi yang padat dan pantai Laut Merah. Hadi tidak memiliki basis kekuatan pribadi, tetapi menjadi boneka untuk separatis selatan, suku di timur laut, pejuang Sunni, dan sisa-sisa tentara yang setia kepada Ahmar.

Persaingan internal bahkan muncul dalam koalisi yang dibentuk oleh Arab Saudi untuk mendukung Hadi. Riyadh dan sekutu utamanya, Uni Emirat Arab, berbeda dalam hal sekutu dan taktik lokal. Pasukan Houthi dan Saleh diusir dari Aden dan sekitarnya di Yaman selatan, dan dari Marib tengah dan daerah gurun di timurnya pada tahun 2015. Tahun-tahun kebuntuan militer terjadi.

Kelompok Houthi menguasai sebagian besar dataran tinggi yang mudah dipertahankan. Mereka juga menduduki pantai Laut Merah yang datar dan pelabuhan Al Hudaydah, titik masuk terakhir untuk memasok Yaman utara. Koalisi terus melakukan serangan udara intens, yang bertujuan untuk memecah-belah Houthi dan Saleh. Mereka memberlakukan blokade parsial untuk menghentikan Iran dari mempersenjatai Houthi—sesuatu yang disangkal dilakukannya. Tetapi meskipun ada tekanan ini, namun pembicaraan yang didukung PBB tidak sampai ke mana-mana. (Matamatapolitik.com 2018)

Hingga, pasukan keamanan Yaman terbagi menjadi dua, dengan sebagian membela kaum Sunni yang dimana menjadi poros pemerintahan utama pada saat itu, dan lain nya bergabung kepada pemberontak Huthi yang notabene ialah kaum Syiah. Presiden saat itu Mansour Hadi banyak didukung di Yaman selatan, yang dimana memang menjadi basis kekuatan Islam Sunni dan pusat pemerintahan Yaman kala itu. Pesatnya perkembangan wilayah pemberontak Houthi di Yaman Barat serta pendudukan ibu kota Yaman, Sana'a, pada bulan September menarik perhatian pemain-pemain regional besar yang berkepentingan menjaga stabilitas Yaman dan akses ke perairan *Bab El-Mandeb*. (Priambodo 2017)

Sedangkan Yaman merupakan negara yang terletak di sudut barat daya semenanjung Arab yang berbatasan dengan Saudi Arabia dan Oman. Laut Merah di bagian barat dan teluk Aden di selatan memisahkan Yaman dengan Tanduk Afrika. *Bab el Mandeb*, selat dengan lebar 18 mil yang menghubungkan dua lautan ini, merupakan jalur pelayaran minyak tersibuk keempat di dunia, dan dianggap sebagai “*chokepoint* transit minyak dunia” oleh Departemen Energi AS. Sekitar 3,3 juta barel minyak dari Teluk Persia melewati selat ini setiap hari dalam perjalanan ke Eropa dan Amerika Utara. (Syamina 2015)

Republik Yaman yang mayoritas penduduknya beragama Muslim atau Islam, saat ini sedang mengalami konflik sekte (ideologi) antara pemerintah Yaman dengan Pemberontak yang menamakan dirinya Al-Houthi, sebenarnya hampir semua masyarakat Yaman beragama Muslim, yang terdiri dari Mahzab Sunni dan Syi'ah, yang mewakili sekitar 30% dan 70% dari total penduduk masing-masing. Sekte Sunni berada di bagian selatan Yaman dan sekte Syi'ah

berada di bagian utara Yaman yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi. (Nugroho 2016)

Dua tahun sejak diluncurkannya kampanye yang dipimpin Saudi, perdamaian di negara yang bermasalah itu tampak jauh seperti sebelumnya. Presiden Hadi dan perdana menterinya, Ahmed Obaid bin Daghir, sekarang memerintah dari kota pelabuhan Aden, yang mereka nyatakan sebagai ibukota sementara. Sebagian besar dataran tinggi utara Yaman, dan ibu kota Sanaa, tetap berada di bawah kendali Houthi dan sekutu mereka. Di tengah pertempuran yang sedang berlangsung, kondisi di negara itu terus memburuk. Infrastruktur dan kapasitas industri negara itu hancur, dan krisis kemanusiaan sedang menuju kelaparan. Bahkan daerah-daerah yang sekarang di bawah kendali pemerintah Hadi terbelah oleh ketidakstabilan. Kerusuhan di Yaman bukanlah sebuah konflik tunggal, melainkan sebuah mosaik dari berbagai perebutan kekuasaan regional, lokal, dan internasional yang merupakan peninggalan dari peristiwa baru-baru ini dan di masa lalu. (European Council On Foreign Relations 2017)

Awal dari pemberontakan dan kekerasan di Yaman Utara antara lain ketidaksenangan Pemberontak Houthi terhadap pemerintahan Abdullah Saleh dan unjukannya yang menyatakan dukungannya melawan terorisme, selaras dengan program yang diluncurkan Washington. Sejak itulah awal mula ketidaksenangan Houthi dan juga tidak senang melihat hubungan mesra pemerintahnya dengan Amerika Serikat dan juga karena merasa termarginalkan.

Seiring berjalannya waktu dan bola konflik yang semakin besar maka konflik internal Yaman tidak hanya sebatas ketidaksenangan terhadap ungkapan

presiden Yaman Ali Abdullah Saleh yang menyatakan dukungannya melawan teroris atau hubungan kerja sama Yaman dengan Amerika Serikat, akan tetapi Pemerintah Yaman di selatan juga menuding Houthi ingin menggulingkan sistem pemerintahan dan menggantikannya dengan imâmah. Sedangkan Houthi yang didukung penduduk Yaman Utara menuding pemerintah Yaman melakukan diskriminasi dan marginalisasi ekonomi di kawasan Sa'adah di Yaman Utara. Selain itu juga konflik Yaman sudah menyebar keranah idiologi agama antara Sunni dengan Syi'ah dan keinginan Pemberontak Houthi yang ingin keluar dari Yaman dan membentuk negara baru yang berlandaskan Imamah yang berada di Yaman Utara.

Houthi merupakan kelompok pemberontak yang berbasis di Yaman Utara. Pengikut Houthi terkenal dengan sebutan Houthis. Penamaan ini dinisbatkan pada pencetusnya, Husein Badaruddin Houthi. Pemberontak Houthi bermukim di sebelah Utara Yaman dan merupakan Yaman Utara dahulu sebelum bersatunya Yaman Utara dengan Yaman selatan, pemberontak ini sudah lama berusaha melawan Rezim Ali abduulloh Saleh dan Houthi juga mempunyai banyak anggota, pada tahun 2005 saja tercatat sekitar 3000 orang dan meningkat pesat pada tahun 2009 sekitar 10.000 orang. (Simanjuntak 2011)

Penduduk Yaman yang mayoritas tinggal di wilayah Yaman Utara atau lebih tepatnya di provinsi Sa'ada. Wilayah ini termasuk wilayah yang tertinggal dan tidak tertata dengan rapi, perbedaan jauh terjadi dengan wilayah lain seperti provinsi Sana'a. Ditambah dengan sikap pemerintah Yaman yang kurang mengakomodir tuntutan Houthi dan lebih bersikap represif dalam menghadapi mereka, menjadikan penggulingan pemerintahan sebagai tujuan pemberontakan

agar mereka mendapatkan hak-hak mereka. Pemerintah Yaman menurunkan kekuatan militernya untuk menghadapi pergerakan kelompok Houthi, pemerintah menggunakan conventional military dengan berbagai persenjataan beratnya melawan musuh yang unconventional. (Salmoni et. All 2010)

Al-Houthi menganggap presiden Ali Abdullah Saleh melakukan tindak korupsi yang menyengsarakan banyak rakyat. Menurut laporan Panel Ahli badan Dunia, presiden Ali Abdullah Saleh telah melakukan korupsi 1978 sampai tahun 2012. (Republika 2015) Ditambah dengan adanya tudingan dari kelompok Houthi bahwa Abd Rabbuh Mansur sebagai wakil presiden Ali Abdullah saleh sekaligus penggantinya telah menutup-nutupi tindak pidana korupsi yang banyak dilakukan oleh pemerintah. Tujuan yang paling utama dari pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok ini adalah untuk mengambil alih pemerintahan dan kemudian menjalankannya dengan ideologi mereka yaitu Syiah. Dengan kata lain, kelompok Houthi ingin mendirikan Negara Syiah di wilayah Yaman terutama di wilayah Yaman utara. Hal tersebut diperkuat dengan pendudukan Jabal dukhan di wilayah selatan Arab Saudi oleh Kelompok ini. (Furqan 2009)

Oleh karena itu, pemerintah Arab Saudi masih tetap memberlakukan invasi militernya terhadap Yaman. Puluhan ribu nyawa warga Yaman telah melayang, dan saat ini, jutaan warga Yaman menderita kelaparan akut. Tak berhenti di situ saja, agresi militer terhadap Yaman itu juga telah melahirkan banyak persoalan baru, seperti munculnya wabah kolera yang disebut-sebut sebagai wabah terburuk sepanjang sejarah. (Fadel 2018)

Namun operasi militer yang didukung Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Maroko dan bahkan Pakistan itu jelas terlihat merupakan demonstrasi kekuatan kaum Sunni. Bukannya aksi solidaritas terhadap rakyat Yaman. Operasi militer ini merupakan bagian dari sebuah skenario besar yang juga dimainkan di Suriah, Irak dan Libanon. Yakni mendesak pengaruh Syiah Iran dari kawasan. Dari perspektif Arab Saudi, ekspansi militer Huthi di Yaman merupakan peningkatan ancaman. (Sollich 2015)

Sehingga dapat disimpulkan dalam permasalahan konflik Yaman ini, tidak hanya terjadi pada permasalahan konflik internal saja, melainkan permasalahan yang melibatkan negara luar yang memiliki kepentingan di Yaman, adapun kepentingan itu merupakan kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan. Termasuk kepentingannya Arab Saudi di Yaman. Tak lepas dari proses penyelesaian konflik yang penyusun akan bahas dimana pertimbangan kemanusiaan menjadi hal yang sangat penting dalam konflik Yaman ini. Oleh sebab itu penyusun akan membahas masalah yang penyusun angkat sebagai judul berikut **‘Pengaruh Invasi Militer Arab Saudi Serta Implikasinya Bagi Dinamika Konflik di Yaman’** yang bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan dalam menempuh ujian sarjana program strata satu jurusan ilmu hubungan internasional.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Sejauh mana strategi arah dan tindakan invasi Arab Saudi terhadap dinamika konflik di Yaman ?
2. Sejauh mana persepsi ancaman dinamika akar konflik serta keterlibatan invasi militer Arab Saudi di Yaman ?
3. Bagaimana proses penyelesaian konflik dalam kepentingannya di Yaman dengan korelasinya terhadap invasi militer Arab Saudi di Yaman ?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penulisan lebih spesifik dan efisien maka diperlukannya pembatasan masalah, sehingga penyusun membatasi masalah pada persepsi ancaman serta proses penyelesaian dinamika konflik di Yaman.

1.4 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam permasalahan ini yaitu sebagai berikut :

“Sejauh mana persepsi ancaman serta proses penyelesaian konflik korelasinya dengan keterlibatan invasi militer Arab Saudi di Yaman ?”

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui strategi arah dan tindakan invasi Arab Saudi terhadap dinamika konflik di Yaman.
- b. Untuk mengetahui persepsi ancaman dinamika akar konflik serta keterlibatan invasi militer Arab Saudi di Yaman
- c. Untuk mengetahui proses penyelesaian konflik dalam kepentingannya di Yaman dengan korelasinya terhadap invasi militer Arab Saudi di Yaman.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian untuk memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Ujian Sarjana Program Strata Satu Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Selain menjadi salah satu syarat tersebut, diharapkan penyusunan skripsi ini dapat memberikan kegunaan yang bermanfaat untuk umum baik secara ilmiah atau praktis. Adapun diantaranya :

1.5.2.1 Kegunaan Secara Ilmiah

Kegunaan secara ilmiah ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan teoritis dalam memahami Pengaruh Invasi Militer Arab Saudi Implikasinya Bagi Dinamika Konflik di Yaman. Landasan teori tersebut juga dapat terus diuji validitasnya sehingga ditemukan pemahaman baru.

1.5.2.2 Kegunaan Secara Praktis

- a) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai kajian oleh penelitian lain sebagai penyempurnaan.
- b) Hasil penelitian data berguna bagi pembaca sehingga memberikan pengetahuan baru.